

Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014

Muhtar Haboddin*

Abstrak

Tahun 2014 merupakan pemilihan umum yang keempat dilaksanakan pasca turunnya Soeharto dari kursi kekuasaan. Untuk menghadapi pemilu 2014 para pekerja politik, pengurus dan pimpinan partai politik, baik pusat maupun daerah sudah melakukan langkah-langkah taktis dengan mencoba mendekati diri kepada para pemilih pemula. Misalnya mulai beriklan di TV, media massa secara teratur hingga melakukan kunjungan secara langsung ke masyarakat. Mendekatkan diri kepada pemilih pemula merupakan strategi jitu untuk menggaet suara mereka pada pemilu yang akan datang. Misi utamanya adalah selain memperkenalkan ideologi partai juga mensosialisasikan program-program partai politik yang selama ini dilakukan, baik di lembaga parlemen maupun di eksekutif. Harapannya adalah meyakinkan para pemilih pemula yang memiliki tingkat pemahaman politik yang cerdas dan kritis.

Kata kunci: *Pemilih pemula, pilihan politik dan pemilu*

Abstract

The year of 2014 was the year of the 4th general election after Soeharto stepped down from his authoritarian government. To prepare for the general election of 2014, those political workers, political parties elites and administrators, both in the national and local level, had conducted tactical steps by trying to approach the young voters, by using commercial ads on TV regularly or by directly visiting communities. Approaching the young voters was a appropriate strategy to gain their votes for the next general election. The prime goal of approaching young voters besides introducing the political parties' ideologies was to socialize political parties work programs and achievements that had been carried out both in the legislative and executive institutions. The expectation was to convince the critical and politically aware young voters.

Keywords: *Young voters, political choice, general electio*

Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015

Pendahuluan

* Makalah ini pernah disampaikan pada acara Seminar yang dilakukan KPU bekerjasama Universitas Brawijaya Malang, dengan tema Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014, pada tanggal 30 Oktober 2012 di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya. Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP-Universitas Brawijaya. Bisa dihubungi melalui e-mail: muhtar_haboddin@ub.ac.id. Hp: 082143582704.

Apa yang dikatakan Jean Baechler bahwa *'pilihan politik itu harus bagus dan rasional'* sangat relevan untuk dipraktekkan bagi pemilih pemula pada pemilihan umum 2014. Dikatakan relevan, karena kelompok pemilih pemula untuk pertama kalinya menggunakan hak politiknya dalam pesta demokrasi. Oleh karena itu, sangatlah diharapkan apabila pilihan politik yang pertama itu digunakan secara cerdas dan kritis dalam memilih calon anggota legislatif (caleg) atau partai politik yang memiliki keberpihakan para masyarakat-pemilih.

Semangat kritis para pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilu 2014 diperlukan dalam memberikan pelajaran kepada caleg maupun partai politik, yang selama ini memiliki kinerja buruk, asyik mementingkan diri-sendiri, dan tidak pro rakyat. Jiwa kritis pemilih pemula dalam memilih merupakan modal penting dalam menghukum para politisi dan partai politik pada pemilu 2014. Hukuman untuk tidak memilih politisi dan partai politik yang tidak pro rakyat merupakan jawaban atas kekecewaan para pemilih pemula terhadap kinerja partai, pemimpin dan elit politik.

Kekecewaan para pemilih pemula terhadap kinerja politisi dan partai politik tidak hanya di Indonesia tetapi juga ditemukan di Amerika Serikat dan Inggris. Implikasi dari kekecewaan itu adalah pertama, menurunnya kepercayaan pemilih terhadap elit partai politik. *Kedua*, caleg atau kandidat yang ditawarkan oleh partai politik tidak sesuai dengan harapan masyarakat pemilih¹. Tidak hanya itu, sebagian mahasiswa Universitas California pada tahun 1998 menyebutkan hanya 27 persen yang merasa penting untuk mengikuti masalah-masalah politik. Sementara mahasiswa di Inggris, menyebutkan 60-75 persen 'tidak tertarik' atau 'tidak terlalu tertarik' dengan kegiatan politik².

Data di atas menunjukkan sikap kritis para pemilih pemula terhadap kinerja politisi dan partai politik. Kinerja yang buruk akan dilawan dengan sikap kritis oleh kaum muda. Sikap kritis ini perlu ditumbuh-kembangkan dalam tubuh pemilih pemula. Ujung akhir dari sikap kritis tersebut bermuara pada pilihan yang cerdas dan berkualitas pada pemilu 2014.

Pemilih Pemula: Siapa dia?

Secara politik, pemilih pemula selalu menjadi incaran partai politik dalam setiap perhelatan akbar lima tahunan. Hal ini bisa dipahami karena:

Muhtar Haboddin, Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014 *tut*
um

*memiliki jangkauan politik yang cukup kuat sehingga membuka peluang yang sangat besar untuk dirangkul partai politik mana pun*³.

Laporan ini mengisyaratkan betapa penting eksistensi pemilih pemula ini bagi caleg dan partai politik. Selain itu, pemilih pemula juga digambarkan sebagai pemilih yang belum memiliki jangkauan politik luas serta belum mengenal dunia politik. Dengan gambaran itu menjadi wajar apa bila menjadi target bagi parpol pada pemilu. Pertanyaan adalah siapa yang

¹ Keith Faulks, *Sosiologi Politik: Suatu Pengantar Kritis*, Bandung: Nusamedia, 2010. hlm.235

² *Ibid.*, hlm.237

³ *Kompas*, 24 November 2008

dimaksud pemilih pemula? Laporan *Kompas* menyebutnya pemilih pemula adalah *golongan penduduk usia 17 tahun hingga 21 tahun*. Selanjutnya, dibagian yang lain *Kompas* menulis kelompok pemilih pemula ini adalah mereka yang yang berstatus pelajar, mahasiswa serta pekerja muda. Atau kelompok pemilih pemula ini adalah mereka yang baru akan punya pengalaman mencoblos untuk pertama kali pada pemilu⁴ 2014.

Poin penting dari definisi di atas adalah menempatkan pemilih pemula sebagai pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Bila diringkas akan berbunyi: pemilih pemula adalah mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda yang sedang berusia 17 tahun hingga 21 tahun dan belum pernah ikut mencoblos dalam pemilu. Pemahaman ini senapas dengan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu menyebutkan bahwa warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah berhak ikut memilih (*pasal 19 ayat 1*). Sementara draf RUU Politik dari LIPI mengatakan warga negara yang pada waktu pendaftarkan pemilih untuk pemilu sudah genap berumur 17 tahun, mempunyai hak untuk memilih⁵.

Regulasi di atas memberikan pijakan dan batasan tentang sosok pemilih pemula. Batasan ini melegalkan pemilih pemilu dalam pemilu. Senapas dengan itu, bila dilihat animo pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu sangat tinggi. Sebagai contoh dalam Jajak Pendapat *Kompas* menyebutkan bentuk partisipasi apa yang ingin Anda lakukan dalam pemilu mendatang? Jawaban atas pertanyaan ini terangkum pada tabel 1, yang menyebutkan bahwa mereka akan ikut berpartisipasi memilih pada pemilu yang akan datang.

Tabel 1: Bentuk partisipasi dalam pemilu mendatang

Kelompok usia	Prosentase
Usia 17-21	86,4
Usia 22-29	81,3
Usia 30-40	81,6
Usia 40 ke atas	79,3

Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015

Pemilih Pemula Dalam Bingkai Demokrasi

Jaminan hukum sebagaimana diatur dalam UU pemilu bukan lahir secara tiba-tiba. Tetapi, nalar ini bisa dilacak kebelakang dengan merunut pasal yang terkandung dalam Deklarasi Hak Azazi Manusia (HAM). Pasal 21 ayat 1 dalam Deklarasi HAM yang menyebutkan setiap orang mempunyai hak untuk memberikan andil dalam pemerintahan dinegerinya masing-masing, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas. Penjelasan pasal ini diimplementasi dengan baik oleh pemerintah dengan memberikan ruang partisipasi bagi warga negara yang sudah dewasa untuk memilih anggota parlemen maupun eksekutif.

⁴ *Ibid.*,

⁵ Indria Samego (ed) *Menata Negara: Usulan LIPI Tentang RUU Politik*. Bandung: Mizan, 1998. hlm.95

Pemberian ruang partisipasi bagi pemilih pemula dalam pemilu merupakan jawaban terhadap jaminan hak politik seseorang. Dalam sistem pemilu yang demokrasi pilihan politik seseorang diberi kebebasan untuk memilih yang sesuai dengan hati nuraninya. Atau dalam bahasa, John Locke: *setiap orang mempunyai hak yang sama pada kebebasan untuk memilih*. Pendapat Locke, diperkuat oleh filsuf liberal Inggris, yang bernama James S Mill, percaya bahwa pemberian suara harus dilakukan di depan umum, agar para pemilih bertanggungjawab pada sesama warga negara atas suara yang mereka berikan, dan karenanya mereka terdorong untuk lebih memikirkan kepentingan-kepentingan publik yang lebih luas daripada kepentingan-kepentingan pribadinya yang sempit⁶.

Baik Locke maupun Mill secara tegas mendorong kebebasan untuk pemilih atau memberi suara dalam pemilu. Tidak hanya itu, kedua pemikir ini juga memberikan ruang yang lebih besar kepada para pemilih untuk ikut menentukan pemimpin-pemimpin yang dikehendaki. Dengan kata lain, ada jaminan bagi setiap warga negara yang telah mempunyai hak memilih untuk mendukung pemimpin atau para calon/wakil yang disukainya menurut aspirasi dan kepentingannya.

Jaminan kebebasan memilih dijunjung tinggi dalam pemilu didasari oleh pemikiran bahwa ada kesamaan hak memilih pemimpin atau para wakil rakyat merupakan roh demokrasi. Selain itu, dalam sistem pemilu dikenal pula diktum: *satu orang, satu suara*. Diktum ini mendudukkan kesamaan nilai dan bobot seseorang. Dalam bahasa yang lebih sederhana dimaknai setiap suara mempunyai nilai yang sama. Implikasinya adalah pemilu yang demokrasi diarah benar-benar berorientasi kepada tegaknya kedaulatan rakyat.

Pemilih Cerdas: Tugas Pemerintah dan KPU/D

- ***Tugas Pemerintah***

Muhtar Haboddin, *Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014* mengatakan pemberian suara/memilih merupakan kewajiban. Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah pertama, pemerintah harus mewajibkan warganya untuk ikut serta dalam pemilu. Hal ini sudah lama dilakukan oleh Negara Australia. *Kedua*, harus ada usaha mewajibkan orang-orang menggunakan ‘hak-hak politik mereka dalam pemilu⁷. Dua hal ini sangat penting dalam politik, dalam memahami bahwa pemilu merupakan urusan publik. Karena itu, setiap warga masyarakat wajib mendatangi bilik suara dan memberikan hak politiknya. Sebagai ilustrasi pada pemilu 2009 yang lalu, Jajak Pendapat Kompas menanyakan: apa motivasi pemilih pemula untuk ikut dalam pemilu? Jawaban atas pertanyaan itu terangkum pada tabel 2.

Tabel 2: Motivasi pemilih pemula ikut dalam pemilu 2009?

Indikator	Prosentase
------------------	-------------------

⁶ David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi 80 Tanya Jawab*. Jogjakarta: Kanisius, 2000. hlm.75

⁷ *Ibid.*, hlm.73

Menunaikan kewajiban warga Negara	67,4
Memenangkan salah satu parpol	11,8
Ingin punya pengalaman	9
Sekedar ikut-ikutan	0,9
Lain-lain	8,6
Tidak tahu	2,3

Kompas, 1 Desember 2008

Tabel 2 secara jelas menyuguhkan fakta baru perihal antusiasme pemilih pemula dalam menggunakan hak politik pada pemilu. Menurut data, sebanyak 67,4 persen motivasi pemilih pemula mengikuti pemilu karena ingin menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Angka ini menduduk peringkat pertama. Sementara 11,8 persen keikutsertaan pemilih pemula dalam pemilu dalam usaha memenangkan salah satu parpol yang menjadi idolahnya. Selanjut, dalam tabel di atas juga menjelaskan motivasi pemilih pemula ikut pemilu karena ingin mempunyai pengalaman.

Ketiga, pemerintah perlu menjamin bahwa pemilu 2014 akan berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis. Dengan jaminan pemilu yang demokratis, diharapkan para pemilih pemula menggunakan hak pilih secara baik. Asumsinya adalah menggunakan hak lebih efektif untuk melakukan perubahan dibandingkan mengambil sikap golongan putih (golput). Dengan menjatuhkan pilihan secara tepat, pemilu sebenarnya adalah momentum harapan. Harapan untuk perubahan kontinuitas penguasa.

Selanjutnya pada tabel 3 menjelaskan bentuk partisipasi pilihan pemilu pada pemilu. Adapun pertanyaan Jajak Pendapat *Kompas* kepada responden adalah jika pemilu dilaksanakan saat ini apakah Anda memilih salah satu parpol peserta pemilu?

Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015

Tabel 3: Jika pemilu dilaksanakan saat ini apakah memilih salah satu parpol peserta pemilu?

Umur	Memilih	Tidak memilih
17-22	87,10	12,90
23-25	89,84	10,16
26-35	93,65	6,36
36-40	89,61	10,39
40-	84,62	16,38

Kompas, 14 Oktober 2008

Keempat, pengaturan media massa dalam pemilu 2014. Pengaturan media oleh pemerintah diperlukan supaya bisa lebih adil dan demokratis dalam melakukan siaran publik. Hal ini menjadi penting karena para pemilih pemula akan sangat dipengaruhi oleh isu-isu politik terkini dalam memberikan suara mereka pada pemilu 2014, ketimbang sekedar memilih

berdasarkan perasaan setia atau loyalitas kepada partai tertentu⁸. Bila demikian penjelasannya, maka dikawatirkan pada pemilu 2014 partai politik berlomba-lomba menggunakan dan memanfaatkan penggunaan media massa secara efektif untuk memperoleh suara pemilih pemula.

Logika ini bisa dipahami karena kelompok pemilih pemula ini merupakan ladang suara yang sangat dibutuhkan tiap organisasi politik. Selain itu, pemilih pemula ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Karena itu, siapapun yang dapat menguasai suara kelompok ini, dapat dipastikan akan memperoleh lonjakan suara yang sangat besar pada pemilu 2014.

- **Tugas KPU/D**

Selain tugas pemerintah, KPU/D juga memiliki tugas dalam membangun kesadaran politik pemilih pemula. Salah satu tugas KPU/D adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih pemula supaya mereka 'paham tentang politik' dan mengerti soal pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilu 2014. Harapannya adalah menghasilkan pemilih pemula cerdas.

Untuk menghadirkan pemilih pemula yang cerdas tentu bukanlah perkara mudah dan gampang. Karena itu, pekerjaan KPU/D adalah memastikan bahwa para pemilih diberitahu dan dididik akan makna pentingnya ikut dalam pemilu. Selain itu, program sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih pemula perlu terus ditingkatkan intensitasnya supaya ma
prc
Muhtar Haboddin, Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014
lan
teknis, tetapi dalam prakteknya prosedur mempunyai arti terhadap penggunaan hak pilih seseorang. Karena itu, tugas KPU/D ke depan adalah pertama, mengidentifikasi agar semua warga yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah memilih hak pilih. Kedua, pemilih secara suka rela mendaftarkan diri ke lembaga penyelenggara pemilu (KPU/D). Keaktifan semua warga untuk mendatangi lembaga penyelenggaraan untuk menanyakan apakah dirinya terdaftar atau tidak dalam pemilu 2014. Artinya sebagai pemilih pemula sejatinya menjadi warga yang aktif berpolitik. Ketiga, bahwa seseorang harus ada namanya dalam daftar pemilihan umum.

Kedua, karena pemilih pemula ini sudah paham soal politik, termasuk soal pemilihan umum yang akan dihelat negeri setahun ke depan. Bahkan, pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya. Yakni kelompok tua.⁹ *Ketiga*, pemilih yang cerdas diharapkan akan melahirkan wakil-wakil rakyat aspirasi dan pemimpin yang bertanggungjawab dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pemilih yang cerdas menjadikan pemilu sebagai momentum harapan dapat direalisasikan secara lebih pasti¹⁰.

Pemilih pemula yang cerdas merupakan gambaran ideal yang ingin tuju. Karena menghadirkan sosok pemilih pemula tersebut akan memberikan perubahan besar dalam pengisian pemimpin dan elit politik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Inilah tugas berat yang mesti diemban oleh KPU/D ke depan. Dimana sosok pemilih pemula yang cerdas

⁸ Keith Faulks, *op.cit.*, hlm.240

⁹ *Kompas*, 1 Desember 2008

¹⁰ Sigit Pamungkas, *Pemilu, Perilaku Pemilhi, dan Kepartaian*, Jogjakarta: IDW, 2009. hlm.79

sudah pasti memiliki kapasitas intelektual yang ‘mumpuni’ dan memiliki daya kritis terhadap sosok dan kinerja partai politik.

Tiga Strategi Menghadirkan Pemilih Cerdas

- **Program dan figur**

Pemilu 2014 merupakan ajang pembuktian bagi politisi dan elit pemerintahan dihadapan pemilihnya. Proses pembuktian yang dinanti-nantikan pemilih pemula adalah kinerja para politisi dan elit pemerintahan. Karena itu, pada pemilu kali ini mereka dituntut untuk melaporkan apa yang telah diperbuat kepada pemilih selama menjadi elit pemerintahan. Pelaporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawab yang paling esensial kepada pemilih. Pertanyaan adalah apa yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan? Jawabnya tidak lain adalah program-program yang pernah ditawarkan pada saat kampanye pemilu 2009. Dengan melaporkan dan mempertanggungjawabkan maka para politisi bisa dikatakan akuntabel bagi para pemilihnya. Artinya para pemilih akan menilai bahwa mereka telah melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan pemilih dan kemudian memberikan kesempatan untuk duduk ke

Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015

Kesadaran politik semacam ini perlu dimiliki oleh pemilih pemula. Dengan kesadaran politik yang tinggi para pemilih pemula diharapkan akan memperhatikan program dan melakukan penilaian yang kritis terhadap kompetensi masing-masing partai dan kandidat dalam memecahkan permasalahan.¹² Penjelasan ini senada dengan analisis Kacung Marijan:

Ketika menentukan pilihannya, para pemilih pemula sejatinya mempertimbangkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki para kandidat, baik kelebihan kapasitas pribadi maupun kelebihan-kelebihan program kerjanya. Penilaian semacam ini diperlukan untuk dijadikan pertimbangan bagi pemilih pemula. Mengapa? Karena pilihan yang didasarkan atas pertimbangan pasti yang terbaik menurut rasionalitas mereka¹³.

Kombinasi antara penilaian program dan figur dalam menentukan pilihan politik pada pemilu 2014 merupakan kemajuan yang luar biasa. Dikatakan demikian karena pada pemilu 2009 para pemilih pemula sudah mulai merintis jalan ini. Artinya, dalam memberikan pilihan politiknya mereka sudah mempertimbangkan popularitas individu/parpol, persoalan visi-misi, program dan janji-janji. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.

Tabel 4: Pertimbangan dalam memilih partai politik

Indikator	Prosentase
Visi-misi, program dan janji-janji partai	16,26
Citra tokoh partai dan lembaga partai politik	37, 43
Alasan-alasan pragmatis	24,93

¹¹ M Asfar, *Esai-Esai Seputar Pemilu 2004*. Surabaya: Eureka dan Pusdemham, 2005. hlm.40

¹² Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris*, Jakarta: FNS-LSI, 2008. hlm 49

¹³ Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah*, Surabaya: Eureka dan Pusdeham, 2006. hlm.84

Alasan lain	14,23
Tidak menjawab	6,64

Kompas, 9 September 2008

- ***Pemilu 2014 Sebagai Arena Menhukum politisi.***

Strategis kedua yang perlu dilakukan dalam menghadirkan pemilih cerdas adalah menjadi pemilu sebagai arena menghukum politisi atau partai politik. Momentumnya adalah dengan menggunakan pemilu 2014 sebagai waktu yang paling tepat untuk menghukum partai dan politisinya yang selama ini bermain-main dengan nasib rakyat. Karena itu, salah satu tugas mulia para pemilih pemula adalah menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan kritis. Pilihan cer ini *Muhtar Haboddin, Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014* ini atau partai yang layak dinaikkan ke panggung kekuasaan, atau sebaliknya didepak dari kursi eksekutif dan legislatif.¹⁴

Pilihan untuk mengangkat dan mendepak politisi dari kursi parlemen dan eksekutif merupakan kuasa pemilih pemula. Caranya adalah dengan menjatuhkan pilihan politiknya ke figur dan partai yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka dan rakyat banyak. Pada tataran yang lebih kongkrit, kita sering mendengar bagaimana massa menghukum partai tertentu dengan mengalihkan pilihan politiknya ke partai lain. Misalnya, gerakan menggembosi partai Golkar di Sulawesi Selatan pada pemilu 2009 dan gerakan menghukum PDIP sebagai partai ‘wong cilik’ pada pemilu 2004 dan 2009. Gerakan ini merupakan bukti bagaimana pemilih menghukum politisi dan partai-politik.

Adapun alasan pemilih dalam menghukum politisi dan elit partai adalah setelah lima tahun berkuasa, tidak tampak tanda-tandanya perubahan politik ke arah yang lebih baik. Kinerja anggota DPR/D, baik di pusat maupun di daerah, sangat buruk. Bahkan, kita disuguhkan tontotan yang menajukkan yakni setiap lima tahun anggota DPR/D selalu berbicara seputar kenaikan gaji, kenaikan tunjangan kesehatan, lembur dan studi banding hingga uang pesangan¹⁵.

- ***Politisi Busuk***

Strategi terakhir yang perlu dilakukan adalah memasifkan gerakan atau kampanye anti-politisi busuk pada pemilu 2014. Hal ini menjadi penting karena gerakan politisi busuk ini amat relevan dalam sistem pemilu yang berorientasi pada kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Karena itu, pemilih pemula sangat dianjurkan untuk menandai nama kandidat yang termasuk kategori politisi busuk. Daya kritis pemilih pemula sangat dianjurkan supaya pemilu 2014 sangat berkualitas.

Dari pelacakan literatur ditemukan enam tujuan dari gerakan politisi busuk ini adalah *pertama*, sebagai gerakan moral, sikap kritis terhadap politisi mencerminkan kesadaran dan

¹⁴ M Asfar, *op.cit.* hlm.40

¹⁵ *Ibid.*

kepekaan mendasar yang amat diperlukan dalam menyongsong pemilu¹⁶ 2014. *Kedua*, para politisi busuk harus dienyahkan dari pilihan adalah mereka yang terlibat korupsi, melakukan kejahatan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, melakukan kekerasan terhadap perempuan, dan menyalahgunakan narkoba¹⁷.

Ketiga, dalam jangka panjang gerakan ini akan meningkatkan tekanan kepada parpol terhadap pimpinan partai sehingga mengabaikan proses demokrasi, mutu, dan standar integritas moral. Dengan kata lain, gerakan politisi busuk mendorong demokratisasi internal dan transparansi dalam pemilu partai guna menghindari terjadinya korupsi politik dalam bentuk membeli kandidasi, yang mendistorsi partai menjadi kendaraan segelintir orang berduit.

Keempat, membangun kesadaran kritis pemilih partai untuk keluar dari pilihan-pilihan yang bersifat irasional-komunal, tetapi berdasar ukuran masuk akal seperti riwayat perilaku, kinerja, afiliasi kepentingan, dan sebagainya. Selama ini pemilih dan konstituen senantiasa menjadi 'korban' mobilisasi parpol sehingga tidak kritis lagi terhadap kinerja parpol. *Kelima*, dibandingkan dengan menjadi golput, gerakan ini lebih mendidik pemilih. Minimal tidak sekedar membangun sikap apriori terhadap partai atau pemilu 2014. Harus diyakini, tidak ada partai sempurna, juga tidak semua kandidat partai politik itu busuk¹⁸. *Keenam*, gerakan antipolitisi busuk bukan sekedar mencegah masuknya politisi busuk, tetapi juga untuk menghalangi pembusukan politik. pembusukan politik dalam lembaga politik yang baru lahir dan tumbuh, sama dengan memberi racun kepada tanaman. Akibatnya, bukan hanya kematian bagi lembaga-lembaga demokrasi, tetapi kehancuran legitimasi penyelenggara negara¹⁹.

Menuju Pemilu Berkualitas

Bertitik-tolak pada alur argumen di atas maka sudah bisa dipastikan bahwa pemilu 2014 akan berkualitas. Kualitas pemilunya akan ditentukan kapasitas pemilih pemula dalam memberikan hak politiknya. Secara substantif ada empat tolak-ukur yang bisa dipakai dalam menentukan kualitas pemilu 2014. *Pertama*, pemilih pemula yang terdidik dan berwawasan luas berharap supaya elit dan lembaga politik yang ada mampu memenuhi harapan mereka²⁰. *Kedua*, pemilih pemula yang akan memberikan hak politiknya pada pemilu 2014 merupakan pemilih rasional. Rasionalitas mereka yang menentukan pilihan politik berdasarkan proses evaluasi terhadap kinerja maupun tokoh²¹ yang disodorkan oleh parpol untuk dipilih. *Ketiga*, pemilih pemula memandang penggunaan hak politiknya akan memberikan manfaat bagi kehidupannya, dengan sendirinya mereka akan berpartisipasi pada pemilu²². *Keempat*, pemilih

¹⁶ William Chang "Komunitas Politisi Yang Sehat, dalam, A Soni BL de Rosari (ed) *Siapa Mau jadi Presiden*, Jakarta: Kompas, 2004. hlm 111

¹⁷ Budiarto Danujaya "Signifikansi Gerakan Antipolitisi Busuk" dalam A Soni BL de Rosari (ed) *Siapa Mau jadi Presiden*, Jakarta: Kompas, 2004. hlm.87

¹⁸ Teten Masduki, "Gerakan Tidak Pilih Politisi Busuk" dalam A Soni BL de Rosari (ed) *Siapa Mau jadi Presiden*, Jakarta: Kompas, 2004. hlm.82

¹⁹ Indra Pilian "Politisi Busuk dan Pembusukan Politik" *Kompas*, 2 Februari 2004

²⁰ Keith Faulks, op.cit., hlm.245

²¹ *Kompas*, 13 April 2009

²² *Kompas*, 12 Agustus 2008

pemula merupakan salah satu komoditas politik, tentu saja untuk menarik suara kelompok ini, organisasi parpol harus memberikan perhatian yang cukup dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi²³. Semoga!***.

²³ Riswandha Imawan, *Analisis Hasil Pemilu 1992 di Indonesia*, Jogjakarta: Fisipol-UGM, 2003. hlm.61

Daftar Pustaka

- Asfar, M, 2005. *Esai-Esai Seputar Pemilu 2004*. Surabaya: Eureka dan Pusdemham
- Beetham, David dan Kevin Boyle, 2000. *Demokrasi 80 Tanya Jawab*. Jogjakarta: Kanisius.
- Chang, William “Komunitas Politisi Yang Sehat, dalam, A Soni BL de Rosari (ed) 2004. *Siapa Mau jadi Presiden*, Jakarta: Kompas.
- Danujaya, Budiarto “Signifikansi Gerakan Antipolitisi Busuk” dalam A Soni BL de Rosari (ed) 2004. *Siapa Mau jadi Presiden*, Jakarta: Kompas
- Faulks, Keith, 2010. *Sosiologi Politik: Suatu Pengantar Kritis*, Bandung: Nusamedia
- Imawan, Riswandha, 1993. *Analisis Hasil Pemilu 1992 di Indonesia*, Jogjakarta: Fisipol-UGM,
- Kompas*,12 Agustus 2008; *Kompas*, 24 November 2008; *Kompas*, 1 Desember 2008
- Kompas*,13 April 2009
- Marijan, Kacung, 2006. *Demokratisasi di Daerah*, Surabaya: Eureka dan Pusdeham
- Masduki, Teten, “ Gerakan Tidak Pilih Politisi Busuk” dalam A Soni BL de Rosari (ed) 2004. *Siapa Mau jadi Presiden*, Jakarta: Kompas
- Pamungkas, Sigit, 2009 *Pemilu, Perilaku Pemilhi, dan Kepartaian*, Jogjakarta: IDW,
- Pilian, Indra “Politisi Busuk dan Pembusukan Politik” *Kompas*, 2 Februari 2004
- Roth, Dieter 2008. *Studi Pemilu Empiris*, Jakarta: FNS-LSI
- Samego, Indria (ed),1998. *Menata Negara: Usulan LIPI Tentang RUU Politik*. Bandung: Mizan